

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, teknologi informasi adalah salah satu hal yang sangat diutamakan, dengan menekankan teknologi maka akan membantu sistem dengan cepat, semua sistem yang di ciptakan akan di permudah, semua informasi akan di dapatkan dengan mudah (Arman S. P., 2019). Dalam perkembangan komputerisasi perkembangan teknologi informasi dalam pengolahan data sangatlah diperlukan.

Seiring dengan era globalisasi yang menyebabkan percepatan dalam perubahan gaya hidup dan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan teknologi informasi merupakan salah kebutuhan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat (Mahmuda, Sucipto dan Setiawansyah, 2021). Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untk memperbaiki performa individu dan organisasi (Sawitri, 2017).

Menurut Tridoyo (2017), sebuah organisasi membutuhkan tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance) dalam melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi TI yang diterapkan.

Teknologi informasi merupakan suatu disiplin ilmu yang pada saat ini tidak bisa ditinggalkan atau diabaikan karena merupakan aspek penting dalam menunjang atau membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dimana ketepatan waktu sangat diperlukan pada suatu perusahaan maupun bidang pemerintahan, seperti pada kantor Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan sosial. Salah satu bidang yang ditangani adalah masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). PMKS adalah individu, keluarga atau sekelompok orang yang mempunyai kendala kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi baik fisik, spiritual dan juga sosial secara memadai dan wajar (Adrianto, 2019). Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan

Adapun menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS teridentifikasi dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) fakir miskin, (2) lanjut usia terlantar, (3) penyandang cacat, (4) anak terlantar, (5) anak jalanan, (6) anak balita terlantar dan (7) gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Bidang PMKS memerlukan informasi akurat mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selama ini pengolahan data masih menggunakan *Microsoft Excel* yang mengalami kelemahan dalam pengolahan data, terjadinya penggabungan data pada saat data dientrikan dikarenakan tidak adanya pemberitahuan bahwa data yang sudah ada dientrikan kembali, sementara itu dalam *Microsoft Excel* harus membuka masing-masing *sheet* untuk pengecekan data pada kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga memakan waktu yang relatif lama dalam mencari data yang dibutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu dan mempermudah pengolahan data PMKS menjadi sebuah informasi yang cepat, tepat dan bermanfaat bagi instansi maupun masyarakat. Pengolahan data menurut Kristanto (2018) “Pengolahan data merupakan waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan”. Suatu Proses pengolahan data terdiri atas 3 tahap dasar, yang disebut dengan siklus pengolahan data (*processing cycle*), yaitu input, processing dan output (Valentina, Asparizal, 2018).

Berdasarkan penjelasan pengolahan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan data adalah suatu proses informasi yang dimanifulasi dan dapat berguna bagi pengguna yang memerlukan untuk suatu program dan yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui, maka penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem yang berjudul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) BERBASIS WEB PADA DINAS

SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PESISIR SELATAN”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu, bagaimana cara merancang suatu sistem informasi pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan menggunakan database.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat keterbatasan, waktu dan biaya, maka penulis akan membatasi masalah yang akan di bahas tentang pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang diharapkan yaitu :

1. Dengan adanya perancangan sistem informasi pengolahan data ini diharapkan mampu membantu pihak dinas dalam melakukan proses pengolahan data.
2. Diharapkan dengan adanya penggunaan Database *MySql* dapat melakukan penyimpanan data secara efisien terhadap pengelolaan data PMKS, dengan menggunakan Database *MySql* pengelolaan data dapat terpenuhi dan juga lebih fleksibel dalam penggunaannya.
3. Dengan adanya sistem informasi berbasis *web* ini, dapat di implementasikan dengan baik oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan sehingga dapat membantu pengolahan data PMKS pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sitem informasi untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.
2. Merancang sistem informasi pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.

3. Meningkatkan sistem informasi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial pada kantor Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai implementasi dan pengembangan ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan.
2. Persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Strata 1 Sistem Informasi pada Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Membantu Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pengolahan data PMKS dengan mudah dan cepat.

1.7 Tinjauan Umum Dinas

1.7.1 Profil Singkat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan sosial, yang beralamatkan di Jl.

H.Ilyas Yacub - Painan Kecamatan IV Jurai Kab.Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat

1.7.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.

A. Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.

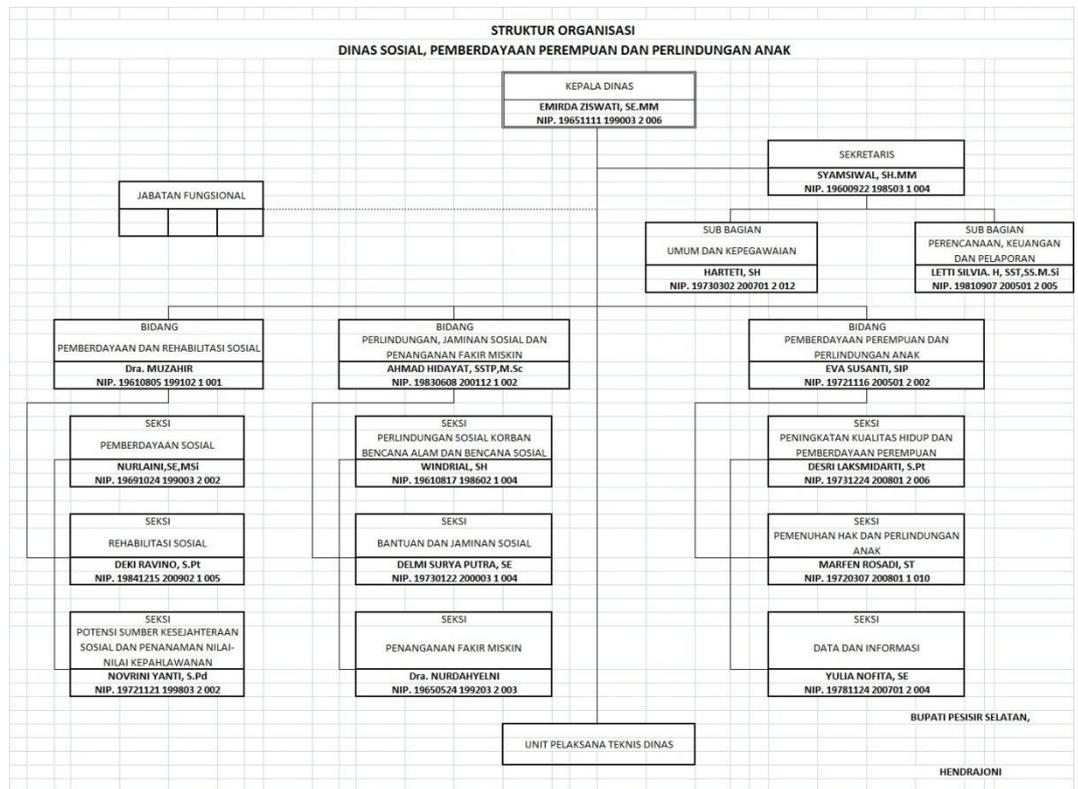
1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju Masyarakat Sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial serta menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

1.7.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

1.7.4 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.